

BAB III

IMPLEMENTASI AANZFTA DI INDONESIA

BAB III ini akan memaparkan pembahasan lebih lanjut mengenai tahap implementasi AANZFTA di Indonesia yang terdiri dari implementasi perancangan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam peraturan besaran tarif, perkembangan liberalisasi tarif, hingga klasifikasi produk berdasarkan ketetapan pengurangan tarif di bawah AANZFTA itu sendiri. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan bagaimana sistematisasi utilisasi AANZFTA sebagai payung hukum atau regulasi utama dalam pemanfaatan fasilitas tarif preferensi dalam perdagangan Indonesia baik pada kegiatan ekspor maupun impor dengan negara mitra dagang yang masih berada di dalam satu kawasan perdagangan bebas dan secara inklusif juga mencakup hubungan perdagangan dengan Australia.

3.1 Tahap Implementasi AANZFTA di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi AANZFTA pada tahun 2011 yang diselesaikan melalui Peraturan Presiden No.26 Tahun 2011 serta Lembaran Negara No.55 tentang pengesahan AANZFTA.¹³⁵ Perpres ini kemudian menjadi landasan hukum bagi pemberlakuan atau implementasi AANZFTA secara resmi di Indonesia.

¹³⁵ *Regional*, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses dalam : <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/perdagangan-jasa/perundingan-jasa/regional> (14/03/2019 20:36WIB)

Meskipun telah diratifikasi, namun pada dasarnya tahap implementasi AANZFTA di Indonesia juga dapat dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan negara anggota lainnya terlebih dengan Australia yang telah jauh memberlakukan AANZFTA sejak tahun 2009. Keterlambatan ini tidak lain dipicu oleh adanya proses panjang yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyesuaikan produk dalam negerinya agar dapat bersaing dengan produk luar negeri.¹³⁶ Proses ini setidaknya membutuhkan waktu tujuh bulan dari posisi awal ratifikasi AANZFTA oleh Indonesia pada bulan Mei 2011 hingga akhirnya benar-benar diimplementasikan pada bulan Januari 2012.

Adapun sistematika penyesuaian produk yang dilakukan Indonesia menitikberatkan pada proses panjang penyusunan rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tarif bea cukai produk di bawah AANZFTA yang kemudian dikeluarkan pada bulan oktober 2011 (Nomor 166/PMK.011/2011) sebagai landasan utama dalam pengimplementasian perjanjian perdagangan bebas tersebut. Dari bulan oktober, Indonesia membutuhkan waktu 60 hari untuk mengumumkan penetapan kebijakan tarif kepada seluruh negara anggota maupun penyampaian notifikasi kepada sekretariat ASEAN yang juga merupakan bagian dari proses penyesuaian dan bentuk transparansi Indonesia dalam proses implementasi AANZFTA itu sendiri.¹³⁷

¹³⁶ Andi Persada Tooy, 2014, *Kepentingan Australia dalam kesepakatan Pembentukan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Tahun 2009*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, hal.7.

¹³⁷ *ASEAN – Australia, New Zealand*, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

Perkembangan implementasi AANZFTA di Indonesia khususnya mengenai aturan tarif perdagangan telah dilaksanakan melalui dua kali proses pembaharuan dan penerbitan PMK baru oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2013 (Nomor 208/PMK.011/2013) dan 2017 (Nomor 28/PMK.010/2017). Pembaharuan terakhir pada PMK tahun 2017 telah menunjukkan adanya pertumbuhan pada tingkat liberalisasi AANZFTA di Indonesia sesuai dengan peningkatan signifikan pada jumlah produk yang terdaftar dalam pos tarif AANZFTA, pengurangan jumlah produk dengan tarif MFN, serta penambahan jumlah produk yang menggunakan tarif preferensi.

Total produk Indonesia dalam PMK tahun 2011 tercatat sebanyak 8.742 pos tarif dengan jumlah produk yang masih menggunakan tarif MFN sebanyak 107 pos tarif.¹³⁸ Sedangkan pada tahun 2013 total produk meningkat drastis di angka 10.012 pos tarif dengan jumlah produk pada tarif MFN sebanyak 104 pos tarif.¹³⁹ Begitu pula di tahun 2017, total produk juga meningkat sampai 10.813 pos tarif dengan jumlah produk yang menggunakan tarif MFN sebanyak 108 pos tarif.¹⁴⁰ Untuk mengukur tingkat liberalisasi produk dalam implementasi AANZFTA di Indonesia berdasarkan jumlah pos tarif tersebut dapat dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan rumus *coverage rate*¹⁴¹ yang membagi jumlah dari pos tarif dengan

¹³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.011/2011, diakses dalam : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/166~PMK.011~2011PerLamp%201.pdf> (15/03/2019 16:44 WIB)

¹³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.011/2013, diakses dalam : <http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/12/576/peraturan-menteri-keuangan/pmk-208-pmk-11-2013/penetapan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor-dalam-rangka-asean-australia-new-zealand-free-trade-area-aanzfta.html> (15/03/2019 16:45 WIB)

¹⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017, Loc. Cit.

¹⁴¹ Coverage rate merupakan rumus yang dapat digunakan untuk memahami dampak dari preferensi FTA terhadap peningkatan liberalisasi produk dengan menghitung besarnya impor dari mitra FTA

tarif preferensi (X) dengan jumlah total pos tarif termasuk tarif MFN (Y) atau dengan kata lain sebagai berikut:

$$\text{Coverage rate} = \frac{\text{(X) Jumlah pos tarif dengan tarif preferensi}}{\text{(Y) Jumlah total pos tarif termasuk MFN}}$$

Jumlah pos tarif dengan tarif preferensi diperoleh dari jumlah total pos tarif dikurangi dengan pos tarif produk yang masih menggunakan tarif MFN. Sementara itu jumlah total pos taif sendiri diperoleh dari hasil penjumlahan antara pos tarif preferensi dengan tarif MFN. Maka dari itu berdasarkan data dari PMK tahun 2011, 2013, dan 2017 sebelumnya, dapat diketahui bahwa *coverage rate* pada tahun 2011 yang terdiri dari perhitungan X sebesar 8635 dibagi dengan Y sebesar 8742 menghasilkan *rate* 0,9878 atau yang dipersentasekan menjadi 98,78%. Sementara itu *coverage rate* di tahun 2013 terdiri dari perhitungan X sebesar 9908 dibagi dengan Y sebesar 10012 menghasilkan *rate* 0,9896 atau yang dipersentasekan menjadi 98,96%. Dan yang terakhir di tahun 2017 menunjukkan *coverage rate* yang terdiri dari perhitungan X sebesar 10705 dibagi dengan Y sebesar 10813 menghasilkan *rate* 0,9900 atau yang dipersentasekan menjadi 99%.

Dari rekapitulasi perhitungan *coverage rate* di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan liberalisasi tarif bea masuk produk di Indonesia dengan melihat penerapan tarif preferensi di bawah aturan AANZFTA pada kenyataannya mengalami kenaikan 0.18% di tahun 2013 dan 0.04% di tahun 2017, meskipun secara umum masih mencakup penggunaan tarif preferensi 0%, penggunaan tarif

yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi. Perhitungan *coverage rate* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi nilai impor atau jumlah pos tarif dari negara mitra FTA yang mendapatkan tarif preferensi serta jumlah total pos tarif secara keseluruhan (termasuk tarif preferensi dan tarif MFN yang $\neq 0$). Dikutip dari : *BKF Kemenkeu, Op. Cit.* Hal.13

preferensi yang $\neq 0$, serta pengecualian penggunaan tarif MFN secara keseluruhan. Selain itu, perkembangan liberalisasi tarif bea masuk juga dapat berbeda apabila dilihat berdasarkan akumulasi garis tarif secara keseluruhan yang diprediksi akan mencapai batas akhir eliminasi pada tahun 2025 berdasarkan jadwal penurunan tarif yang diterapkan oleh masing-masing negara. Perkembangan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Percentage of Tariff Lines with Tariff-Free Treatment

Country	2005 Base Tariffs (%)	2010 (%)	2013 (%)	Final Tariff Elimination (%)	Year Achieved
Singapore	99.9	100	100	100	2009
Australia	47.6	96.4	96.5	100	2020
New Zealand	58.6	84.7	90.3	100	2020
Thailand	7.1	73	87.2	99	2020
Brunei	68	75.7	90	98.9	2020
Malaysia	57.7	67.7	90.9	96.3	2020
Philippines	3.9	60.3	91	94.6	2020
Indonesia	21.2	58	85	93.2	2025
Vietnam	29.3	29	29	89.8	2020
Cambodia	4.7	4.7	4.7	88	2024
Laos	0	0	0	88	2023
Myanmar	3.7	3.6	3.6	85.2	2024

(Sumber : Australian Border Force 2016¹⁴²)

¹⁴² *Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Making Use of AANZFTA to Export and Import Goods*, diakses dalam : <https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/official-documents/Documents/Making-use-of-AANZFTA-to-export-or-import-goods-first-protocol.docx> (16/06/2019 10.18 WIB)

Tabel di atas menunjukkan bagaimana perkembangan liberalisasi tarif negara-negara yang terlibat dalam keanggotaan AANZFTA pada umumnya tidak mencapai angka 100% secara keseluruhan kecuali untuk Singapura, Australia, dan New Zealand. Indonesia sendiri pada akhirnya hanya akan mencapai angka 93.2% dan menjadi negara dengan jadwal penurunan tarif yang paling lama hingga di tahun 2025. Penggunaan fasilitas tarif preferensi ini tentu akan sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk melancarkan perdagangan dengan negara anggota AANZFTA dengan memberi keuntungan sebagaimana Indonesia juga termasuk menjadi pihak yang diuntungkan atau *beneficiary* utama dari adanya pengimplementasian tarif preferensi AANZFTA dari negara lain khususnya Australia yang lebih dulu mencapai angka 99% untuk mereduksi tarif MFN di tahun 2017 dan telah menerima ekspor produk Indonesia dengan tarif preferensi yang bernilai \$2,35 miliar pada tahun yang sama.¹⁴³

Secara spesifik, tahap penerapan eliminasi tarif preferensi di Indonesia secara otomatis mengikuti aturan penurunan tarif AANZFTA dimana sebelumnya negara-negara anggota telah sepakat untuk menurunkan tarif tertentu yang dihitung berdasarkan rata-rata tarif MFN dan tarif preferensi. Proporsi penurunan tarif tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam empat kategori yakni *exclusion list*, *normal track*, *sensitive track-1* (ST-1), dan *sensitive track-2* (ST-2) dimana setiap negara bebas untuk memilih dan menggolongkan produknya dalam empat kategori

¹⁴³ Indonesia akan Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses dalam : <https://www.ekon.go.id/berita/view/indonesia-akan-meratifikasi-7.4348.html> (16/03/2019 06:47WIB)

tersebut.¹⁴⁴ *Exclusion list* merupakan aturan penetapan tarif pada sebuah produk/komoditas yang tidak mengikuti jadwal penurunan tarif atau dengan kata lain menggunakan tarif umum berdasarkan tarif MFN dan tidak memberlakukan tarif preferensi. Di Indonesia, tarif *exclusion list* ini berlaku bagi beberapa jenis produk dengan kode HS¹⁴⁵ antara lain:

Tabel 3.2 Produk dalam *Exclusion list*

No	Produk	Kode HS
1	Binatang hidup jenis lain kuda, keledai, bagal dan hinnie	0101.30.90 0101.90.00
2	Jagung	1005.90.90
3	Beras	(All) 10.06
4	Daging beku	0202.20.00 0204.42.00 0204.43.00
5	Gula	(All) 17.01
6	Alkohol dan minuman beralkohol	(All) 22.03 (All) 22.04 (All) 22.05 (All) 22.06 (All) 22.07 (All) 22.08
7	Rokok	(All) 24.02 (All) 24.03
8	Produk Senjata dan Tank	8710.00.00

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.010/2017)

¹⁴⁴ BKF Kemenkeu, *Op. Cit.* Hal.115

¹⁴⁵ Kode HS atau *Hamonized System* adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, statistik, dan transaksi perdagangan, yang dituangkan dalam enam digit kode sebagai dasar pengenalan produk tersebut. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Kode HS ini dan secara keseluruhan diatur dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Dikutip dari : *HS Code*, Directorate General for National Export Development, Ministry of Trade of The Republic of Indonesia, diakses dalam : http://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/links/98-hs-code (16/03/2019 12:51WIB)

Selanjutnya, *Normal Track* merupakan aturan penetapan tarif yang memberlakukan sistem tarif preferensi atau mengikuti jadwal penurunan tarif yang telah disepakati oleh negara-negara anggota AANZFTA dengan mekanisme mereduksi bea cukai menjadi 0% terhadap suatu produk paling lambat pada tahun 2013. Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan *normal track* ini terhadap beberapa jenis produk sebagai berikut:

Tabel 3.3 Produk dalam *Normal Track*

No	Produk	Kode HS
1	Binatang hidup jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Lembu - Babi - Biri-biri & Kambing - Unggas - Ikan - Krustasea - Moluska - Invertebrata Ais kecuali Krustasea dan Moluska 	0102.90.10 (All) 01.03 (All) 01.04 (All) 01.05 (All) 03.01 (All) 03.06 (All) 03.07 (All) 03.08
2	Buah-buahan	(All) 08.06 (All) 08.07 (All) 08.08 (All) 08.09
3	Sayuran	(All) 07.12 (All) 07.13 (All) 07.14
4	Produk pertanian	(All) 09.01-09.10 (All) 10.01
5	Produk Kimia	(All) 28.01-30.04
6	Barang-barang farmasi	(All) 30.05
7	Kulit	(All) 41.01-41.14
8	Kayu kertas	(All) 37.03

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.011/2013)

Aturan penetapan tarif selanjutnya disebut sebagai *Sensitive Track-1* (ST-1), dimana aturan ini memberlakukan sistem tarif preferensi dengan ketentuan bea masuk suatu produk akan direduksi menjadi 0%-5% paling lambat sampai pada tahun 2020. Ketentuan *Sensitive Track-1* ini diberlakukan oleh Indonesia untuk produk-produk sebagai berikut:

Tabel 3.4 Produk dalam *Sensitive Track-1* (ST-1)

No	Produk	Kode HS
1	<i>Beef</i>	0201.30.00 0202.30.00
2	<i>Dairy Products</i>	(All) 0401.40. (All) 04.02- 04.04
3	Produk Logam	(All) 71.06- 71.18

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.010/2017)

Yang terakhir adalah aturan tarif dalam mekanisme *Sensitive Track-2* (ST-2) yang memberlakukan tarif preferensi dengan menetapkan penurunan tarif Bea Masuk produk 0%-5% yang progresif pada tahun 2025. Adapun produk yang ditetapkan Indonesia untuk masuk kedalam kategori *Sensitive Track-2* (ST-2) adalah:

Tabel 3.5 Produk dalam *Sensitive Track-2* (ST-2)

No	Produk	Kode HS
1	Binatang Hidup jenis sapi perah jantan dan betina	0102.29.19 0102.29.90

2	Alat Angkut	8431.39.40
---	-------------	------------

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.010/2017)

3.2 Utilisasi AANZFTA Sebagai Regulasi Utama Kegiatan Perdagangan Indonesia – Australia

Jika sebelumnya aktivitas perdagangan Indonesia-Australia mengacu pada aturan dan prinsip dalam *World Trade Organization* (WTO) sebagaimana kiblat utama aktivitas perdagangan negara di seluruh dunia, maka pembentukan AANZFTA kemudian lahir sebagai aturan dan prinsip baru yang lebih spesifik bagi perdagangan kedua negara, namun pada dasarnya tetap tidak pergi jauh dari komitmen dan konsistensi negara-negara tersebut untuk melengkapi disiplin WTO dengan mengembangkan akses pasar, mempertahankan daya saing ekonomi, atau membuat reformasi kebijakan domestik sebagai progres yang sebelumnya cukup terbatas dalam cangkupan WTO.¹⁴⁶

Secara umum, aturan dan prinsip dalam AANZFTA telah disusun bersama oleh seluruh negara anggota dalam sebuah Dokumen Perjanjian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – New Zealand. Di sisi lain, regulasi-regulasi tarif perdagangan khususnya penetapan tarif preferensi dalam rangka memanfaatkan AANZFTA kemudian ditetapkan secara fleksibel oleh masing-masing pemerintah domestik di negara anggota dengan kewenangan

¹⁴⁶ *Australia – Indonesia Free Trade Agreement Joint Feasibility Study*, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, diakses dalam : http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180523_joint-feasibility-study-report-on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf (15/06/2019 16:24 WIB)

tersendiri baik dalam hal mengatur mekanisme atau prosedur perdagangan hingga bea masuk tarif produk impor yang dapat disusun secara berbeda-beda berdasarkan kebijakan dan kepentingan nasional masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya telah disebutkan bahwa Indonesia sendiri menetapkan regulasi perdagangan berbasis AANZFTA dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2011, 2013, dan 2017 yang secara keseluruhan mengatur tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA). Sementara itu di sisi lain, Australia sendiri menetapkan regulasi perdagangan berbasis AANZFTA dalam Peraturan Menteri Dalam Negerinya (*Minister of Home Affairs*) No. 98, tahun 2009 yang menjadi amandemen terakhir mengenai tarif bea cukai produk impor dalam rangka implementasi AANZFTA (*Customs Tariff Amendment, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Implementation Act 2009*).¹⁴⁷ Sesuai dengan komitmen seluruh negara-negara anggota yang tertulis dalam Pembukaan Dokumen Perjanjian AANZFTA dengan menyatakan keinginan bersama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas guna menguatkan kemitraan negara-negara menuju integrasi ekonomi regional, serta pengakuan terhadap pentingnya peran dan kontribusi seluruh pihak terlibat untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama dalam memanfaatkan seluruh peluang yang disediakan oleh perjanjian ini, maka utilisasi AANZFTA kemudian menjadi hal yang diutamakan dalam aktivitas perdagangan negara-

¹⁴⁷ *Customs Tariff Amendment, Loc.Cit*

negara tersebut tidak terkecuali bagi aktivitas perdagangan Indonesia dengan Australia.¹⁴⁸

Lebih lanjut, proses utilisasi AANZFTA sangat erat kaitannya dengan implementasi aturan mengenai ketentuan asal barang (*rules of origin*) dengan menekankan penggunaan surat keterangan asal atau SKA (*certificate of origin*) bagi barang atau komoditas yang diekspor oleh suatu negara yang menandakan bahwa barang tersebut berasal atau dihasilkan di negara pengeksport. Terdapat dua jenis SKA yang pada umumnya digunakan oleh suatu negara yaitu SKA Preferensi¹⁴⁹ dan SKA Non-Preferensi¹⁵⁰. Namun, seiring meningkatnya akses perdagangan bebas dalam kegiatan perdagangan internasional, maka tidak heran jika SKA preferensi kemudian cenderung lebih banyak digunakan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Pemanfaatan SKA Preferensi oleh Indonesia di bawah payung hukum AANZFTA dilakukan melalui penggunaan SKA dengan Form AANZ. Jenis SKA tersebut merupakan salah satu dari beberapa form SKA yang dimiliki oleh Indonesia berdasarkan jumlah perjanjian perdagangan bebas yang diikuti. Oleh karena itu, selain memiliki SKA Form AANZ, Indonesia juga memiliki SKA Form

¹⁴⁸ AANZFTA, *Preamble*, diakses dalam : <http://aanzfta.asean.org/preamble/> (17/06/2019 07.34 WIB)

¹⁴⁹ SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang disertakan pada barang ekspor tertentu dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensi atau pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk yang diberlakukan oleh negara tujuan. Dikutip dari *Surat Keterangan Asal*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses dalam : <https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/form> (17/06/2019 09.19 WIB)

¹⁵⁰ SKA Non-Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang disertakan pada setiap barang ekspor namun hanya berfungsi sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyerta asal barang ekspor yang digunakan untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. *Ibid.*

A untuk negara-negara GSP (*Generalized System of Preference*¹⁵¹), SKA Form D untuk *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), berikut Form E untuk *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA), Form AK untuk *ASEAN Korea Free Trade Area* (AKFTA), Form IJEPA/JIEPA untuk *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), Form AI untuk *ASEAN India Free Trade Agreement* (AIFTA), Form IP untuk *Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA), dan yang terakhir adalah Form AJ untuk *ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP).¹⁵² Sementara itu, jika Indonesia tidak menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan suatu negara, biasanya kegiatan perdagangan dilakukan dengan menggunakan SKA Non-preferensi berbentuk Form B.

Terlepas dari itu, perihal penggunaan SKA Form AANZ sendiri telah diatur dalam PMK No.28/010/2017 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan keterangan untuk mendapatkan sebuah tarif preferensi atau tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku secara umum, maka suatu barang impor perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AANZ) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai dengan perjanjian AANZFTA.¹⁵³ Selain itu, aturan penggunaan Form AANZFTA

¹⁵¹*Generalized System of Preference* atau negara-negara GSP adalah adalah suatu sistem yang memfasilitasi pemanfaatan tarif preferensi dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk atas barang-barang yang diekspor oleh negara berkembang ke negara maju dengan tujuan untuk membantu pembangunan negara berkembang yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan devisa melalui kegiatan ekspor itu sendiri. Negara-negara maju yang memberikan fasilitas GSP sejauh ini adalah : Amerika Serikat, Jepang, Norwegia, New Zealand, Swiss, Kanada, Rusia, Bulgaria, Australia, Denmark, Belarus, dan Negara-negara Uni Eropa. Dikutip dari *Generalized System of Preference in Export*, Binus University, diakses dalam : <https://sbm.binus.ac.id/2015/11/27/generalized-system-of-preference-in-export/> (17/06/2019 10.03 WIB)

¹⁵² *Indeks Pabean*, FTA, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

¹⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017, *Op. Cit.*, Hal. 4

juga telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) yang secara keseluruhan membahas ketentuan, syarat, maupun kriteria yang harus dipenuhi oleh negara anggota AANZFTA untuk dapat mengekspor produknya dan memasuki pasar Indonesia.¹⁵⁴ Setidaknya terdapat tiga kriteria yang menjadi syarat utama bagi para eksportir untuk dapat menggunakan tarif preferensi melalui form AANZ, yakni dengan memenuhi kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dan kriteria prosedural seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 dalam peraturan bea cukai tersebut.

Setiap produk yang memiliki tarif preferensi atau tergolong kedalam salah satu kelompok dengan jadwal penurunan tarif preferensi di bawah aturan negara dengan utilisasi AANZFTA, dalam proses ekspor-impornya secara otomatis akan memerlukan SKA Preferensi atau form AANZ untuk disertakan bersama dengan produk tersebut. Bentuk formulir AANZ sendiri secara keseluruhan diselaraskan dimana masing-masing negara anggota akan menggunakan form AANZ dengan format yang sama. Format tersebut secara umum meliputi keterangan mengenai negara yang mengeluarkan SKA tersebut, keterangan lengkap eksportir dan importir, transportasi dan rute yang digunakan selama proses pengiriman, keterangan utilisasi perjanjian AANZFTA, nomor produk dan kemasan, jumlah dan

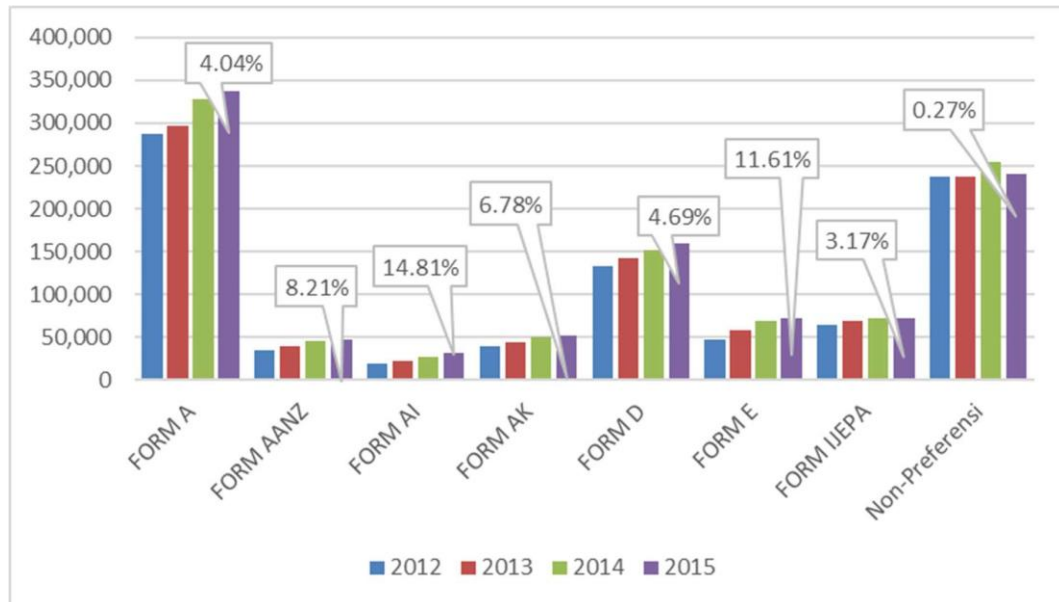
¹⁵⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-55/BC/2011, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, diakses dalam : http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/01/fcf355240473-per-55bc_2011.pdf (17/06/2019 12.15 WIB)

berat produk, kode HS, nomor dan tanggal faktur, pernyataan eksportir, dan sertifikasi formulir.¹⁵⁵

Selain menjadi syarat konstitusional untuk mendapatkan tarif preferensi ataupun tiket masuk untuk mengekspor sebuah komoditi menuju wilayah negara tertentu, utilisasi SKA Preferensi di bawah regulasi AANZFTA juga sangat penting karena akan menjadi tolak ukur perkembangan statistik perdagangan negara anggota. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, secara keseluruhan penggunaan SKA Preferensi oleh Indonesia sendiri terbilang cukup baik meski belum maksimal, dikarenakan terdapat beberapa form SKA termasuk form AANZ yang memang masih berada pada angka yang rendah jika dibandingkan dengan pemanfaatan form SKA yang lain. Grafik berikut akan menunjukkan perbandingan rata-rata persentase dan jumlah SKA yang pernah diterbitkan oleh Indonesia dalam kegiatan ekspornya pada periode 2012 – 2015.

¹⁵⁵ *Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Making Use of AANZFTA to Export and Import Goods, Op. Cit.* Hal 20.

**Grafik 3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan SKA Ekspor Indonesia
menggunakan Tarif Preferensi Negara Mitra, 2012-2015**



(Sumber : BPS dan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan RI, diolah oleh Kementerian Perindustrian RI Ditjen KPAII 2016¹⁵⁶)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 2012 hingga 2015 jumlah SKA yang paling banyak diterbitkan oleh Indonesia adalah SKA dengan bentuk Form A yang di tahun 2015 sendiri hampir mencapai 350 ribu lembar. Posisi kedua diikuti oleh SKA Form D untuk ATIGA dimana jumlah penerbitan tahun 2015 mencapai lebih dari 150 ribu lembar, sedangkan SKA untuk form lainnya termasuk AANZ masih berada di angka kurang dari 100 ribu lembar. Namun dari segi rata-rata pertumbuhan penerbitan SKA per tahun, form AANZ sendiri menempati laju pertumbuhan yang tergolong tinggi bersamaan dengan laju pertumbuhan SKA Form AI untuk AIFTA dengan persentase 14.41%, disusul

¹⁵⁶ Tidak dipublikasikan, *Studi Utilisasi Tarif Preferensi FTA*, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional (KPAII).

dengan SKA form E untuk ACFTA dengan persentase pertumbuhan 11.61%, dan form AANZFTA dengan persentase pertumbuhan sebesar 8.21%. Tinggi rendahnya penerbitan masing-masing Form SKA per tahun berdasarkan grafik tersebut memang menunjukkan bahwa maksimalisasi pemanfaatan tarif preferensi melalui FTA di Indonesia bersifat fluktuatif. Namun setidaknya dengan tingginya persentase pertumbuhan SKA sendiri dapat menjadi tolak ukur bagaimana Indonesia terus berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan utilisasi FTA tersebut tidak terkecuali untuk AANZFTA sendiri.

Penggunaan SKA preferensi Form AANZ dalam memanfaatkan AANZFTA tentunya tidak hanya berlaku bagi proses ekspor produk Indonesia atau negara-negara ASEAN lainnya menuju Australia dan New Zealand, tetapi sebaliknya juga berlaku bagi produk-produk impor yang dikirim oleh Australia dan New Zealand menuju negara-negara ASEAN. Adapun data persentase produk-produk yang diimpor Indonesia dengan memanfaatkan AANZFTA dan FTA lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Data Impor Indonesia dengan Utilisasi FTA

KOMODITI	IJEPA	ATIGA	IP-PTA	ASEAN-China	ASEAN-India	ASEAN-Korea	AANZ
Bahan Baku dan Penolong	74,40%	68%	9,60%	61,60%	70,08%	82,90%	67,70%
Barang-barang modal	17,40%	10,30%	-	19,70%	14%	7,90%	0,60%
Barang-barang Konsumsi	8,10%	21,60%	90,40%	18.80%	15,20%	9,20%	31,70%

(Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI 2018¹⁵⁷)

Dalam tabel tersebut, bahan baku dan penolong mengacu kepada segala bentuk komoditas bahan baku dan penolong yang digunakan dalam proses produksi atau dapat mendukung proses produksi pada sembilan sektor Industri di Indonesia yaitu Industri mesin dan logam, elektronik, makanan dan minuman, kimia dasar, barang kimia lain, otomotif, tekstil dan produk tekstil, pakan ternak, serta pulp dan kertas. Beberapa komoditas diantaranya dapat berbentuk bahan baku bungkil kedelai untuk industri pakan ternak, bahan baku kain dan benang untuk industri tekstil, hingga bahan baku susu bubuk bahkan sapi perah untuk industri makanan dan minuman.¹⁵⁸ Selanjutnya, barang-barang modal meliputi semua jenis komoditas yang tahan lama dan dapat digunakan untuk melangsungkan atau melancarkan kegiatan produksi. Barang modal ini bisa dipakai berulang-ulang dengan umur pemakaian yang relatif lama hingga mencapai satu tahun dengan harga yang relatif tinggi juga. Beberapa jenis barang modal yang sering diimpor Indonesia adalah mesin logam, penggilingan, hingga mesin air panas.¹⁵⁹ Barang yang terakhir adalah barang konsumsi yang tidak lain meliputi semua jenis komoditas atau barang tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk

¹⁵⁷ *Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Skema FTA*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses dalam : https://cbm-group.co.id/wp-content/uploads/2018/12/Konsinyering_BKF_20122018-min.pdf (18/06/2019 20.10 WIB)

¹⁵⁸ *64% Industri Nasional Bergantung pada Bahan Baku Impor*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9306/64-dari-Industri-Nasional-Bergantung-pada-Bahan-Baku-Impor> (18/06/2019 21.56 WIB)

¹⁵⁹ *Barang Modal (Capital Good)*, Badan Pusat Statistik, diakses dalam : <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=192> (18/06/2019 22.11 WIB)

keperluan rumah tangga. Beberapa jenis komoditas ini misalnya daging sapi dan beras.¹⁶⁰

Pada akhirnya setiap produk yang tergolong ke dalam produk dengan tarif preferensi baik di bawah aturan FTA secara umum ataupun AANZFTA secara khusus, tentunya akan membutuhkan Surat Keterangan Asal Preferensi yang diterbitkan oleh masing-masing negara eksportir sebagai dokumen wajib yang harus disertakan dalam proses perdagangan komoditasnya terhadap negara lain di dalam satu kawasan perdagangan bebas yang sama. Keadaan ini tentu dapat mendorong setiap negara untuk memperkuat komitmennya dalam memanfaatkan FTA terlebih dengan dikeluarkannya aturan penetapan tarif preferensi dengan menggunakan SKA khususnya oleh negara-negara anggota AANZFTA dalam peraturan Pemerintah Nasional masing-masing, juga akan semakin memperkuat negara-negara tersebut untuk memanfaatkan fasilitas AANZFTA, dan tentunya berlaku bagi setiap pelaku usaha dengan kegiatan perdagangan atas produk yang menggunakan tarif preferensi.

¹⁶⁰ Barang Konsumsi (*Consumer Good*), Badan Pusat Statistik, diakses dalam : https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=8 (18/06/2019 22.15 WIB)